

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, dengan jumlah penduduk besar yang mencapai 281,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024), merupakan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Besarnya jumlah penduduk diikuti oleh beragam permasalahan di berbagai bidang, seperti sosial dan ekonomi, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan kondisi di mana individu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Sastrawan dkk., 2024). Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan ketika kebutuhan rumah tangga, baik jasmani maupun rohani, terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup yang layak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar individu dapat hidup layak serta mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sering dikaitkan dengan istilah *standard of living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life* (Al Farisi dkk., 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menegaskan bahwa menciptakan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan utama negara. Oleh karena itu,

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah.

Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan nasional sendiri tidaklah mudah mengingat keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis di Indonesia. Di antara masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus terdapat kelompok yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, PPKS mencakup individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Salah satu kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi bagian prioritas untuk ditangani adalah fakir miskin, yakni masyarakat yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin). Jumlah penduduk Indonesia yang besar juga turut meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan, terutama karena keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah (Astuti, 2021).

Tabel 1.1. Rekap Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	Jenis PMKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	20	9	7	7	8
2	Anak Terlantar (AT)	20	15	21	20	18

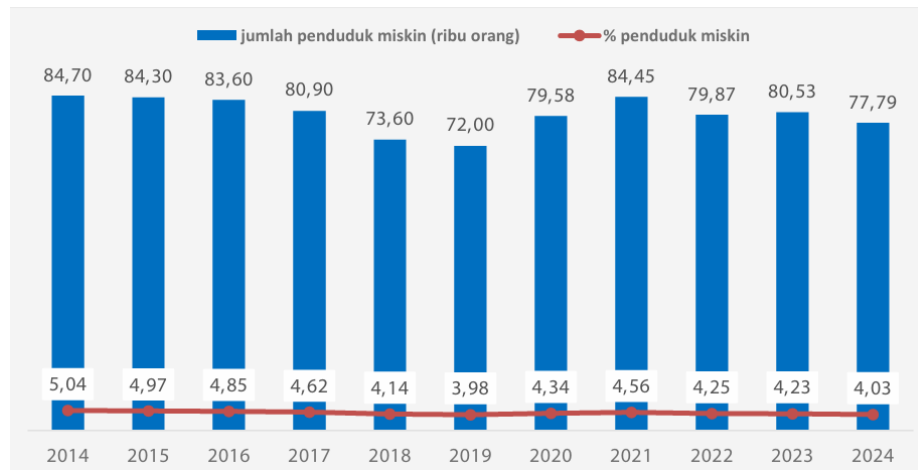
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	0	1	1	1	0
4	Anak Jalanan (AJ)	30	23	26	5	3
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	450	534	424	453	354
5.a	• Anak dengan Disabilitas Fisik	88	336	165	194	134
5.b	• Anak dengan Disabilitas Sensorik	61	65	48	68	52
5.c	• Anak dengan Disabilitas Mental	162	183	173	162	111
5.d	• Anak dengan Disabilitas Ganda	27	50	38	29	57
6	Anak menjadi korban tindak kekerasan	4	3	3	4	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6	4	4	4	6
8	Lanjut Usia Terlantar	33	63	53	56	32
9	Penyandang Disabilitas	1,417	1,521	1,773	1,741	1,598
9.a	Penyandang Disabilitas Fisik	486	763	804	742	671
9.b	Penyandang Disabilitas Sensorik	189	381	353	381	358
9.c	Penyandang Disabilitas Mental	318	197	429	411	380
9.d	Penyandang Disabilitas Ganda	161	177	187	207	189
10	Tuna Susila (TS)	2	11	4	4	1
11	Gelandangan	1	1	1	1	1
12	Pengemis	22	35	31	31	1
13	Pemulung	42	51	53	39	48

14	Kelompok Minoritas/Waria	2	5	2	0	0
14.a	Waria	0	0	0	0	0
14.b	Gay	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lapas	31	39	31	31	26
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	7	14	9	9	7
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	2	2	2	2
18	Korban <i>Trafficking</i>	1	1	1	1	1
19	Korban Tindak Kekerasan	6	6	6	6	6
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	2	2	2	1
21	Korban Bencana Alam	0	13	0	0	0
22	Korban Bencana Sosial	12	19	14	14	14
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	160	227	160	152	147
24	Fakir Miskin	50,457	20,402	30,470	28,804	63,091
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	5	4	4	4
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0

Sumber: Data diolah Peneliti dari Sebaran Data PPKS & PSKS Kota Semarang 2020-2024

Di Kota Semarang, permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi isu penting, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Tanjung Mas atau daerah pinggiran seperti Tembalang. Banyak keluarga fakir miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2023, sekitar 4,85% penduduk kota atau sekitar 83.000 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya, kondisi ini tetap mencerminkan tantangan serius yang dihadapi kelompok fakir miskin di tengah dinamika perkotaan.

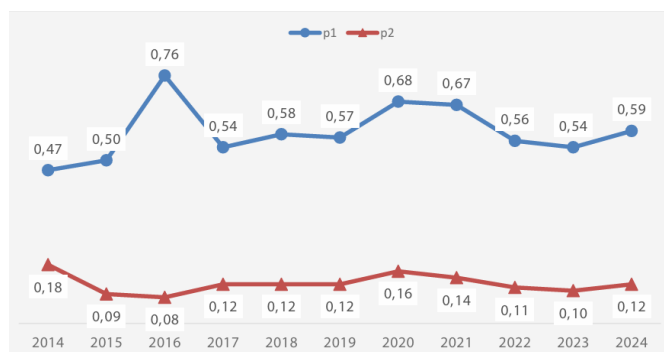


Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2014-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Kota Semarang adalah salah satu kota yang memiliki performa ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), Kota Semarang mencapai Rp156,57 juta per tahun untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka ini sendiri merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Capaian ini diperkuat oleh data pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Semarang yang mencapai rata-rata pengeluaran sebesar RP914.785 per kapita per bulan, angka ini sendiri meningkat sebesar 14,7% dibanding tahun 2023 dan merupakan yang tertinggi se-Jawa Tengah. Pengeluaran non-makanan juga mencapai Rp1.322.997 per kapita per bulan, yang juga turut mengalami peningkatan sebesar 12,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan total pengeluaran per kapita per bulannya yang mencapai Rp2.237.782 (Badan Pusat Statistik/Susenas, 2024). Selain itu, Kota Semarang merupakan kota dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,24 di tahun 2024,

yang menjadikannya salah satu kota dengan IPM tertinggi di Indonesia. Secara keseluruhan gambaran tersebut menandakan bahwa Kota Semarang merupakan pusat perekonomian yang maju.

Di balik kondisi capaian ekonominya, Kota Semarang memiliki paradoks yang menjadi tugas lain penting dalam menangani fakir miskin. Kota Semarang memiliki rata-rata Gini Rasio yang mencapai 0,40 pada rentang 2020-2023, angka tersebut menjadikan Kota Semarang masuk ke dalam kategori ketimpangan yang sedang, namun berada di atas rata-rata nasional tahun 2023 sebesar 0,388 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi tidak dirasakan secara merata, terutama pada kelompok fakir miskin. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Semarang mengalami peningkatan dari 0,54 menjadi 0,59, serta indeks keparahan kemiskinan (P2) naik menjadi 0,12 dari 0,10, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan pengeluaran di antara fakir miskin yang melebar (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

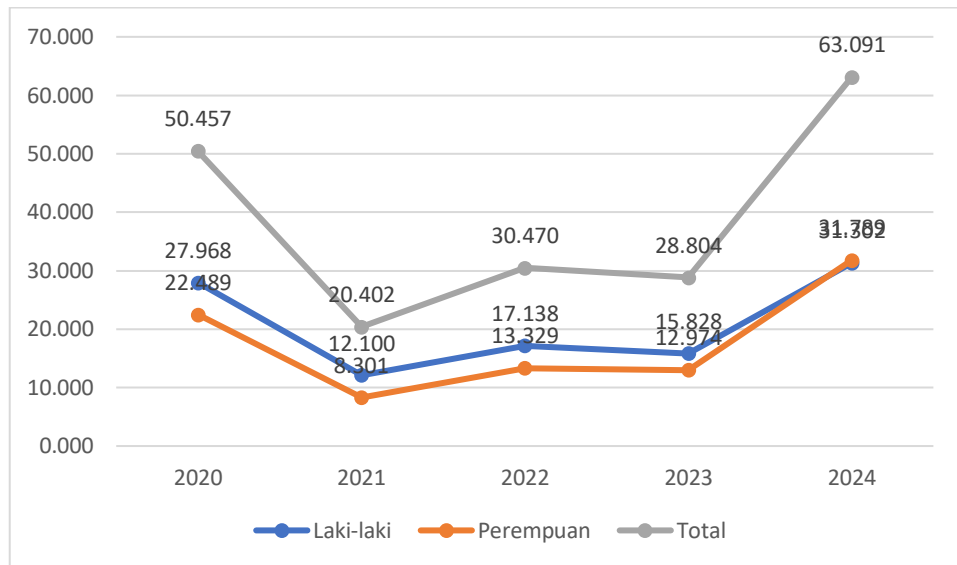


Gambar 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2014-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Kondisi tersebut turut diperparah oleh kenaikan garis kemiskinan dari Rp671.936 per kapita per bulan di tahun 2024 menjadi Rp709.785 di tahun berikutnya, hal tersebut menandakan bahwa adanya beban hidup yang semakin berat, sementara daya beli yang dimiliki oleh fakir miskin masih belum menguat. Kondisi perbedaan yang tinggi antara pengeluaran rata-rata masyarakat dengan garis kemiskinan menandakan bahwa jurang kesejahteraan yang ada di Kota Semarang cukup dalam. Ketimpangan tersebut adalah kondisi yang memprihatinkan serta penting untuk diteliti, karena menunjukkan bahwa adanya kemajuan pada ekonomi suatu kota belum mampu menyentuh kelompok rentan secara efektif.

Fakir miskin merupakan salah satu dari banyaknya kategori PPKS dengan jumlah yang paling signifikan jika dibandingkan dengan kategori yang lainnya di Kota Semarang. Berdasarkan pada data rekap PPKS Kota Semarang tahun 2020-2024, angka fakir miskin bergerak secara fluktuatif dan mengalami inkonsistensi dengan tren penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Di tahun 2020, jumlah fakir miskin di Kota Semarang mencapai 50.457 jiwa, mengalami penurunan drastis di tahun 2021 menjadi 20.402 sebesar 59,6%. Hal ini dibersamai dengan adanya upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pasca-pandemi serta upaya pelaksanaan intensif dalam program sosial pemerintah. Adapun penurunan tersebut dapat terjadi karena adanya penyesuaian serta validasi data dibanding cerminan kemandirian ekonomi yang meningkat secara nyata dari kelompok fakir miskin. Indikasi tersebut kemudian menjadi melonjak tinggi pada tahun 2022 yang mencapai 30.470 atau sebesar 49,4% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1.3. Grafik Jumlah Fakir Miskin Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah Peneliti dari Sebaran Data PPKS & PSKS Kota Semarang 2020-2024

Pada tahun berikutnya, angka tersebut mengalami penurunan moderat sebesar 5,5%, namun lonjakan yang mengkhawatirkan terdapat pada tahun 2024 yang di mana jumlah fakir miskin mencapai 63.091 atau meningkat sebesar 118,9%. Lonjakan tersebut terjadi secara bersamaan dengan data kemiskinan makro BPS yang sebaliknya menunjukkan penurunan sebesar 3,80% (2025) dari 4,03 (2024), hal tersebut mengindikasikan ketidakselarasan antara data pada kemiskinan agregat serta kondisi riil kelompok fakir miskin di tingkat makro. Kondisi fluktuatif tersebut mempertegas bahwa masalah fakir miskin yang ada di Kota Semarang tidak hanya sebatas persoalan angka, melainkan mencerminkan masih diperlukannya optimalisasi pada pemberdayaan yang dijalankan.

Salah satu yang menjadi pondasi utama dalam proses pemberdayaan adalah adanya pemahaman yang baik pada fakir miskin mengenai kondisi yang sedang mereka alami. Menurut Sulistiyani (2017), tahap penyadaran tidak hanya sebatas

pada meningkatkan kesadaran mengenai kekurangan, melainkan juga upaya untuk mengenalkan mereka kepada potensi diri yang akan menjadi modal awal untuk berubah. Beberapa program pemerintah di Indonesia telah menunjukkan capaian yang baik pada aspek penyadaran tersebut. Ade Sulistiawati dkk., (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Desa Bongas Kulon memberi dampak yang baik pada pemahaman keluarga fakir miskin tentang kesehatan anak, pendidikan, dan kesejahteraan, yang di mana didapat melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sahirman (2022) juga menunjukkan bahwa adanya proses penyadaran yang dilakukan secara rutin kepada fakir miskin melalui pembinaan kewirausahaan bulanan di Kota Padang dapat berhasil menumbuhkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Pemahaman fakir miskin mengenai kondisi kemiskinan yang mereka alami dan potensi diri masih belum merata di banyak daerah, termasuk Kota Semarang. Penelitian Ramadhani & Novarianti (2024) yang dilakukan di Kota Semarang menemukan bahwa sebagian besar penerima PKH tidak memahami tujuan pemberdayaan jangka panjang dan hanya memandang program sebagai bantuan karitatif semata, bukan sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian. Kondisi tersebut selaras dengan hasil penelitian Rosmaida dkk. (2021) yang dilakukan di Kabupaten Mamasa, di mana rendahnya pemahaman masyarakat tentang kondisi sosial-ekonomi mereka menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Freire (dalam

Sulistiyani, 2017) mempertegas bahwa kesadaran kritis menjadi salah satu syarat yang penting dalam upaya melakukan transformasi sosial, sehingga masih kurangnya pemahaman kondisi kemiskinan dan minimnya kesadaran pada potensi diri menjadi hambatan struktural yang dapat membuat tahapan pemberdayaan menjadi terhambat.

Di banyak daerah yang ada di Indonesia, program pelatihan keterampilan yang dilakukan kepada fakir miskin menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Sahirman (2022) menunjukkan bahwa program pemberdayaan melalui Rumah Zakat di Kota Padang berhasil meningkatkan keterampilan para wirausaha fakir miskin melalui adanya pelatihan kewirausahaan bulanan yang terstruktur, sehingga proses penguatan kapasitas yang konsisten dapat mendorong kemandirian ekonomi kelompok tersebut. Ike Hikmawati dkk. (2023) juga menemukan bahwa pendekatan penguatan (empowering) melalui pelatihan kepada nelayan tradisional yang dilakukan di Kabupaten Garut memberi dampak positif dalam meningkatkan keterampilan teknis yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas produktif. Capaian-capaian tersebut menegaskan bahwa pelatihan keterampilan teknis yang terprogram dengan baik memiliki potensi nyata dalam menggerakkan fakir miskin menuju aktivitas produktif yang berkelanjutan.

Akan tetapi, penerapan keterampilan teknis masih menghadapi kendala serius dalam aspek keberlanjutan, termasuk di Kota Semarang. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara nasional menunjukkan bahwa tantangan terbesar ada pada keberlanjutan usaha kelompok, di mana tidak sedikit kelompok yang tidak aktif

setelah bantuan modal awal habis karena keterbatasan keterampilan pengelolaan usaha dan pemasaran. Qurrotun Ayun & Yulianingsih (2021) dalam penelitian yang dilakukan di Lamongan menemukan bahwa pelatihan keterampilan merajut mampu meningkatkan pendapatan warga, tetapi keberlanjutannya dihambat oleh adanya nilai jual produk yang rendah serta peserta yang tidak menuntaskan kegiatan pelatihan lanjutan. Chambers (dalam Sulistiyani, 2017) menjelaskan bahwa ketiadaan keterampilan teknis yang berkelanjutan dapat menjebak fakir miskin dalam deprivation trap sehingga peluang ekonomi tidak mampu untuk diakses secara mandiri.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual merupakan bagian tertinggi dalam proses pemberdayaan, di mana fakir miskin dituntut untuk mampu mengambil keputusan ekonomi secara mandiri dan melakukan penyusunan rencana pengembangan usaha yang berkelanjutan (Sulistiyani, 2017). Sejumlah penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tahapan tersebut akan dapat tercapai apabila pendampingan dilakukan secara intensif serta berorientasi pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Elsa Yunika dkk. (2022) menemukan bahwa program pemberdayaan berbasis pendidikan yang dilakukan di Kampung Selangan, Bontang, dapat mendorong kelompok binaan untuk melakukan perencanaan pengembangan ekowisata secara mandiri melalui tahapan penyadaran, transformasi pengetahuan, dan pemandirian. Mustanir dkk. (2025) menyimpulkan bahwa model pemberdayaan yang paling efektif salah satunya adalah yang berbasis pada partisipasi dan aset komunitas, karena model tersebut mendorong masyarakat

agar secara aktif dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya mereka sendiri.

Berdasarkan kajian terhadap efektivitas program KUBE di Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022) juga turut mencatat bahwa kelemahan mendasar sebagian besar kelompok KUBE terletak pada kemampuan anggota dalam menyusun rencana usaha, mencatat keuangan, dan memasarkan produk secara mandiri pasca-bantuan yang masih minim dan perlu untuk ditingkatkan lebih lagi. Fachrul Najamudin & Al Fajar (2024) dalam penelitian penerapan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) di Palembang menemukan bahwa perencanaan usaha yang secara tidak matang menjadi salah satu faktor utama yang membuat kelompok binaan sulit dalam mencapai kemandirian meski potensi aset lokal tersedia. Mardikanto & Soebianto (2012) mempertegas bahwa perencanaan usaha tidak hanya sebatas pada keterampilan teknis saja, tetapi menjadi bagian inti dari proses pemberdayaan menuju kemandirian

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh fakir miskin menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan, karena SDM tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga motivasi dalam mewujudkan kesejahteraan (Mardikanto & Soebianto, 2012). Dalam hal tersebut, motivasi yang lahir dari adanya dorongan internal dapat menjadi modal sosial yang kuat. Vander Kelen dkk. (2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang muncul dari rasa kepemilikan serta keterlibatan aktif menjadi sumber utama keberhasilan pemberdayaan. Abdul Ahmad Ali (2020) juga menemukan bahwa strategi pemberdayaan yang paling efektif bagi kelompok miskin adalah yang

menguatkan SDM melalui beberapa hal, yakni pemberian pelatihan, pemberian modal, dan pembentukan organisasi lokal sebagai tempat bagi mereka untuk dapat saling membantu. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang dikelola melalui struktur kelompok dapat menjadi pengungkit keberhasilan program pemberdayaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, pengetahuan dan keterampilan SDM fakir miskin di Kota Semarang masih menjadi hambatan struktural. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa tidak sedikit penduduk miskin yang tinggal di perkotaan hanya menempuh pendidikan setingkat SD atau SMP, yang secara langsung membatasi kemampuan mereka dalam mengakses pekerjaan layak dan memahami manajemen usaha. Nyoman Ruja dkk. (2024) dalam kajian sistematis yang dilakukan mengenai program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara berkembang menemukan bahwa ketidaksesuaian sasaran program dan rendahnya kapasitas SDM penerima manfaat menjadi dua faktor penghambat terbesar keberhasilan program pemberdayaan. Mustanir dkk. (2025) mempertegas bahwa pemberdayaan berbasis komunitas sering mengalami kegagalan karena adanya ketidakmampuan SDM dalam melakukan pengorganisasian diri dan mempertahankan usaha yang ada secara kolektif. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak langsung pada daya adaptasi fakir miskin terhadap perubahan ekonomi, sehingga penguatan aspek pengetahuan, keterampilan, dan motivasi menjadi prasyarat utama keberhasilan pemberdayaan di Kota Semarang.

Di Kota Semarang, kerangka kebijakan pemberdayaan fakir miskin telah tersedia secara relatif lengkap, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH),

KUBE, Program Perumahan, dan pengembangan UMKM yang mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif. Secara nasional, PKH dinilai sebagai salah satu program perlindungan sosial dengan efektivitas biaya terbaik di Indonesia yang terbukti mampu meningkatkan konsumsi keluarga miskin dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (TNP2K, 2020). Program-program tersebut menjadi landasan penting bagi fakir miskin di Kota Semarang untuk mengakses berbagai layanan dasar dan kegiatan produktif, serta sejalan dengan target SDGs Nomor 1 tentang penghapusan kemiskinan dan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2029.

Pada keadaan riilnya, efektivitas kebijakan tersebut dalam menjangkau fakir miskin secara tepat sasaran masih menghadapi hambatan yang signifikan. Santoso dkk. (2023) menemukan bahwa di Kota Semarang, ketidaktepatan sasaran program pemberdayaan masih terjadi akibat data DTKS yang belum sepenuhnya valid dan adanya pergantian petugas verifikasi yang tidak konsisten. Ramadhani & Novarianti (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Semarang belum optimal karena kebijakan tidak diterapkan secara konsisten dan pendampingan belum memadai. La Didi (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Buton Tengah juga menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, pelaksanaannya sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran. Dunn (2016) menegaskan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki kejelasan tujuan, konsistensi implementasi, serta dukungan

kelembagaan yang kuat, yang di mana ketiga hal tersebut masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang juga sejalan dengan agenda pembangunan global, terutama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) . SDGs adalah bentuk komitmen oleh bangsa-bangsa dalam mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya di tahun 2030, yang dilandasi dengan prinsip utama *leaving no one behind* atau memastikan upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut dilakukan tanpa meninggalkan kelompok-kelompok marginal dan rentan. Begitu pula dalam upaya pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan di Kota Semarang secara langsung memberi kontribusi dalam mencapai setidaknya tiga tujuan sekaligus, yakni SDGs 1 dalam penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, penjaminan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan. Pencapaian target juga dilakukan selaras pada poin 1.2, yakni mengurangi setidaknya separuh proporsi penduduk miskin dalam segala dimensinya sesuai dengan definisi nasional, dan 1.4, yakni menekankan betapa pentingnya akses yang setara atas sumber daya ekonomi, peluang usaha, serta layanan keuangan bagi kelompok miskin dan juga rentan.



Gambar 1. 4 Poin 1, 8, dan 10 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Sumber: Website United Nations (2025)

SDGs 8 (*Decent Work and Economic Growth*) juga menjadi target pencapaian dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, karena adanya tuntutan dalam pemberdayaan kepada fakir miskin melalui pengetahuan serta kemampuan untuk dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian tersebut juga berkontribusi pada pencapaian SDGs 10 (*Reduced Inequalities*) yang di mana pemerintah Indonesia juga turut dalam mempertegas bahwa pencapaian poin-poin dalam SDGs tidak hanya sebatas komitmen global, tetapi bagian dari mandat konstitusional yang menuntut negara untuk dapat memberi dukungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat menjadi bagian kontribusi nyata pada agenda global dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang, dan tidak hanya sebatas penelitian yang relevan di konteks lokal Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bertujuan untuk meneliti mengenai pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang dengan fokus pada tahapan pemberdayaan, yakni penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual dan faktor-faktor yang memengaruhi keberjalanan

pemberdayaan tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, keadaan kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kontekstual untuk mengoptimalkan program pemberdayaan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah fakir miskin di Kota Semarang bergerak secara fluktuatif dan tidak menunjukkan penurunan yang konsisten selama periode 2020–2024, mencerminkan perlunya optimalisasi program pemberdayaan yang dijalankan.
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang tinggi tidak dirasakan secara merata oleh fakir miskin, tercermin dari Gini Rasio 0,40 yang berada di atas rata-rata nasional serta meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada tahun 2024.
3. Sebagian besar penerima manfaat di Kota Semarang tidak memahami tujuan pemberdayaan jangka panjang dan hanya memandang program sebagai bantuan karitatif.
4. Pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang masih terkendala oleh beberapa data DTKS yang belum valid.

5. Rendahnya tingkat pendidikan fakir miskin di Kota Semarang yang sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SD atau SMP membatasi kemampuan fakir miskin.

1.2.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tahapan pemberdayaan yang dilakukan dalam mengurangi fakir miskin di kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat diuraikan tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Menganalisis tahapan pemberdayaan dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tahapan pemberdayaan yang dilakukan dalam mengurangi fakir miskin di kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian tersebut memiliki kegunaan teoritis berupa manfaat ilmiah dalam melakukan pembelajaran serta memahami analisis partisipasi

masyarakat. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu Administrasi Publik terkait topik pemberdayaan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi sebuah media dalam mengembangkan kemampuan di dalam bidang penelitian dengan menggunakan teori dan modal yang peneliti dapatkan selama menerima pembelajaran. Selain itu, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada ilmu Administrasi Publik dalam topik pemberdayaan masyarakat.

b. Dinas Sosial Kota Semarang

Hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan fakir miskin. Penelitian ini membantu Dinas Sosial dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki program-program baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan fakir miskin.

c. Pemerintah Kota Semarang

Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan sosial. Hasil penelitian dapat

menjadi argumen untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi program kesejahteraan sosial.

d. Masyarakat

Masyarakat dapat lebih memahami isu-isu kesejahteraan sosial dan pentingnya dukungan terhadap fakir miskin serta mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program sosial dan memberikan dukungan kepada fakir miskin.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2. State of the Art

No.	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Sahirman (2022). Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tengah oleh Rumah Zakat Kota Padang	Mengkaji program pemberdayaan ekonomi di Rumah Zakat Kota Padang, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera.	Kualitatif	Proses penyadaran dilakukan dengan tahapan kesadaran kewirausahaan dan keagamaan yang dilakukan perbulan. Proses penguatan melibatkan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan pendalaman keagamaan bulanan. Pendayaan dicapai dengan penyediaan modal usaha dan infrastruktur.
2.	Ade Sulistiawati, Syamsuddin RS, Encep Taufik Rahman (2022).	Mengetahui serta menganalisis program yang digulirkan oleh PKH (Program Keluarga	Kualitatif deskriptif	Program pemberdayaan keluarga prasejahtera dilakukan melalui kegiatan pencairan dana bansos dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

	<p>Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam</p> <p>Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan</p>	<p>Harapan), proses pelaksanaan PKH, dan hasil pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui PKH di Desa Bongas Kulon.</p>		<p>Tahapannya dilakukan melalui persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Hasil dari pemberdayaan ditinjau dari aspek kesehatan anak usia dini, pendidikan, dan kesejahteraan sosial pada lansia dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.</p>
3.	<p>Fachrul Najamudin dan Adam Hafidz Al Fajar (2024).</p> <p>Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan ABCD untuk Mencapai SDG 1: Tanpa Kemiskinan.</p>	<p>Mengeksplorasi cara pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD) dalam mendukung pencapaian SDGs 1 yaitu penghapusan kemiskinan.</p>	<p>Kualitatif, Studi literatur</p>	<p>Pendekatan ABCD adalah metode pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, yang mengutamakan pemanfaatan aset lokal yang dimiliki oleh komunitas seperti sumber daya alam, keterampilan individu jaringan sosial, dan kearifan lokal.</p>
4.	<p>Iken Hikmawati, Fingki Fitriani, dan Ade Burhanuddin (2023).</p> <p>Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia</p> <p>Pemberdayaan Nelayan Tradisional</p>	<p>Mengetahui dan menganalisis tahapan pemberdayaan kesejahteraan yang dilakukan pada nelayan di Desa Pamalayan, Kabupaten Garut.</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Tahapan pemberdayaan dilakukan melalui pemungkinan atau fasilitasi (<i>enabling</i>) dengan mengembangkan potensi perikanan, penguatan (<i>empowering</i>) dengan memberikan pelatihan kepada nelayan, perlindungan (<i>protecting</i>) dengan memberikan bantuan modal usaha, dan pendukung (<i>supporting</i>) dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana.</p>

5.	<p>Rosmaida, Agustinus Sudi, dan Yusuf Daud (2021).</p> <p>Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi</p> <p>Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di kecamatan Tawalian.</p>	<p>Mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin serta faktor pendukung dan penghambatnya di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.</p>	Kualitatif	<p>Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Tawalian meliputi perencanaan, pendataan, dan pendampingan belum dilakukan dengan baik.</p>
6.	<p>Hendra, Muhammad Nur, Haeril, Junaidin, dan Sri Wahyuni (2023).</p> <p>Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains</p> <p>Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir</p>	<p>Mengetahui strategi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bima.</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bima melalui pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, juga melalui pembentukan organisasi dan kelompok untuk meningkatkan kerja sama dan gotong royong.</p>
7.	<p>Abdul Ahmad Ali (2020).</p> <p>Jurnal PONDASI</p> <p>Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional</p>	<p>Mengidentifikasi dan melakukan analisis terkait strategi pemberdayaan masyarakat miskin nelayan tradisional berdasarkan teori serta studi kasus yang pernah dikaji sebelumnya.</p>	Kualitatif Studi Literatur	<p>Terbatasnya akses ke pendidikan, akses modal, minimnya teknologi, terbatasnya potensi sumber daya laut, dan adanya persaingan yang intensif. Strategi pemberdayaan yang dilakukan adalah menguatkan SDM melalui pelatihan, pemberian modal dan teknologi yang canggih, serta pembentukan organisasi nelayan lokal sebagai</p>

				wadah berdiskusi dan saling membantu.
8.	<p>Qurrotun A'yun dan Wiwin Yulianingsih (2021).</p> <p>Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat melalui Keterampilan Merajut untuk Meningkatkan Ekonomi Warga di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan</p>	<p>Mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dan hasilnya, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan tersebut.</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sudah cukup baik dengan meningkatnya pendapatan. Faktor pendukungnya yakni ruangan yang nyaman, tutor yang profesional, proses pembelajaran, dan penyesuaian jadwal kegiatan. Faktor penghambatnya yakni ketidaktuntasan warga dalam mengikuti kegiatan, harga nilai jual yang rendah, dan adanya rasa malas.</p>
9.	<p>Oktavia Diva Ramadhani & Widiya Dwi Novianti (2024)</p> <p>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</p> <p>Efektivitas dan Evaluasi Kerja Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Semarang</p>	<p>Menganalisis efektivitas serta evaluasi kerja program PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Program PKH yang dilakukan di Kota Semarang sudah efektif jika dilihat berdasarkan pada berkurangnya jumlah penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat menjadi kendala yang dihadapi dalam menjalankan program.</p>
10.	<p>Elsa Yunika, Yudo Dwiyono, Hepy Tri Winarti, Mustangin, dan Muhamad Alisalman (2022).</p> <p>Jurnal Sosio Dialektika</p>	<p>Menganalisis proses pemberdayaan berbasis pendidikan pada pengembangan ekowisata di Kampung Selangan.</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Pemberdayaan dilakukan melalui tahap penyadaran melalui pengembangan, transformasi pengetahuan melalui pelatihan, dan pemandirian melalui memberikan peluang dan bantuan kepada masyarakat.</p>

	Pemberdayaan Masyarakat Binaan CSR PT. Badak NGL Berbasis Pendidikan pada pengembangan Ekowisata Kampung Selangan Bontang			
11.	Ahmad Mustanir, Kamaruddin Sellang, A. Astinah Adnan, dan Sandi Lubis (2025). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik <i>Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in PPlanning</i>	Mengkaji dan mengidentifikasi model-model pemberdayaan komunitas yang paling efektif dan relevan dalam bidang sosial ekonomi.	Systematic literature review	Pendekatan pemberdayaan yang efektif adalah yang berkaitan dengan partisipasi dan inklusi. Model yang efektif untuk digunakan adalah model berbasis aset atau <i>Asset-Based Community Development</i> (ACBD), partisipasi atau <i>Participatory Rural Appraisal</i> PRA, dan <i>Community-Led Development</i> (CLD).
12.	La Didi (2024). Advances in Social Humanities Research <i>Alleviating Extreme Poverty Through Community Empowerment Programs</i>	Mengkaji dampak program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton Tengah, Indonesia.	Kualitatif deskriptif	Program pemberdayaan masyarakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.
13.	Nyoman Ruja, Sumarmi, dan Idris (2024). Sagepub Journal <i>Programs, Opportunities, and Challenges in Poverty Reduction:</i>	Menganalisis literatur terkait program, peluang, dan tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di dunia.	Systematic Literature Review	Pemberdayaan pada perempuan dapat menanggulangi kemiskinan dengan adanya peningkatan pendapatan dan terciptanya kesejahteraan. Tantangan yang sering sekali dihadapi adalah ketidaksesuaian sasaran

	<i>A Systematic Review</i>			program, kurangnya pendanaan, kesenjangan gender, dan masalah lingkungan.
14.	A. A. Ngurah Anom Kumbara, Mayske Rinny Liando, dan Nanang Sutrisno (2023). Journal of Bali Studies Empowerment of Structures and Agents in Cultural Poverty Alleviation in West Tianyar Village Karangasem Regency Bali	Mengetahui faktor penentu terbentuknya kemiskinan kultural dan mengetahui metode pemberdayaan peran struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan,	Kualitatif	Kemiskinan selalu melibatkan sirkularitas antara kemiskinan alam, struktural, dan kultural sehingga masyarakat sulit menghadapi kemiskinan tersebut. Melalui pemberdayaan peran struktur dan agen upaya penyelesaian masalah kemiskinan dapat dihilangkan secara bertahap.
15.	Catiane Vander Kelen, Alain Mpanya, Epc Hasker, Erick Miaka, Ruth Nzuzi, Justin Pulford, Steve Torr, Dennis Perez Chacon (2023). PLOS Global Public Health <i>Community Empowerment through Participation in a Tsetse Control Project in the Democratic Republic of Congo</i>	Mengetahui dan menilai proses partisipasi masyarakat sebagai bahan evaluasi pemberdayaan masyarakat	Kualitatif	Partisipasi masyarakat menjadi salah satu sumber pemberdayaan masyarakat karena adanya keterlibatan serta rasa kepemilikan dalam masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berbagai Sumber (2025)

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi di dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pada skala besar demi untuk kepentingan publik (Keban, 2014:5). Administrasi merupakan suatu prosedur yang diterapkan dalam melakukan pelaksanaan pada penilaian dan arahan sebagaimana yang diungkapkan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3).

Chandler dan Plano (1988:29) mengemukakan bahwa Administrasi Publik menjadi suatu proses melakukan organisasi serta koordinasi sumber daya untuk melakukan pengembangan, pelaksanaan, serta pengawasan pada pilihan-pilihan yang memiliki kaitan dengan kebijakan publik, hal tersebut berkaitan dengan makna kata publik berarti sebuah komunitas atau negara yang luas.

Dalam tulisannya mengenai Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, dijelaskan bahwa terdapat beberapa arti penting yang perlu diingat mengenai hakikat dari Administrasi Publik (Keban, 2008:7), yaitu:

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan yudikatif dan legislatif.
2. Bidang tersebut berkenaan dengan implementasi dan formulasi kebijakan publik
3. Bidang tersebut berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta, tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta.
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *services*.

6. Bidang tersebut memiliki dimensi praktis dan teoritis.

Berdasarkan dari beberapa definisi dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan bidang yang memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara mengelola dan melaksanakan kebijakan publik melalui organisasi serta koordinasi sumber daya.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Pada dasarnya paradigma berarti suatu cara dalam memahami serta memandang suatu perkembangan pada bidang atau ilmu dan ketika terdapat paradigma dalam suatu bidang ilmu maka dapat dilihat adanya suatu perkembangan pengetahuan pada ilmu itu. Dalam Administrasi Publik sendiri memiliki lima paradigma menurut Nicholas Henry dan Yeremias T. Keban dan Harbani Pasolong (2013:28), yakni sebagai berikut:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Adanya pembahasan mengenai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, organisasi, dan penyusunan anggaran pada pemerintahan dan birokrasi merupakan inti dari administrasi negara pada paradigma tersebut. Sedang ilmu politik sendiri memiliki kaitan dengan masalah-masalah yang bersinggungan dengan pemerintahan, kebijakan, dan politik. Perbedaan keduanya ini menimbulkan kesenjangan yang kemudian membuat politik mendefinisikan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi, yakni adanya keharusan konsentrasi pada kebijakan serta mewujudkan kehendak dari rakyat serta memperhatikan cara penerapan kebijakan dan tingkat

pelaksanaannya sebagai fungsi administrasi. Sehingga dalam tulisannya yang berjudul *Politics and Administration* pada tahun 1990, Goodnow menekankan bahwa yang membedakan politik dan administrasi adalah pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang dimaksud dapat tercermin dalam *trias politica*, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang di mana badan legislatif memiliki kewenangan dalam mengembangkan kebijakan dengan dibantu oleh yudikatif, sedangkan badan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan yang memosisikan diri untuk tidak memihak. Paradigma tersebut menekankan *locus* melalui *government bureaucracy* dan *focus* yang digunakan tidak dijelaskan secara terperinci.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Berbeda dengan paradigma yang pertama, paradigma yang kedua ini memiliki prinsip-prinsip yang lebih jelas dan prinsip-prinsip tersebut menjadi fokus dari Administrasi Publik. Sebagai pelopor dari paradigma tersebut, W. F. Willoughby dalam bukunya yang berjudul *Principles of Public Administration*, bersama dengan Gullick dan Urwick menuangkan prinsip-prinsip administrasi yakni *focus* menjadi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting* yang kemudian dikenal dalam dunia manajemen sebagai POSDCORB. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana saja, sehingga *locus*-nya tidak pernah diungkapkan.

a) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada tahun 1946 dipersoalkan mengenai pemisahan administrasi dengan politik yang merupakan suatu hal yang mustahil oleh Morstein-marx sebagai editor pada sebuah buku *Elements of Public Administration*. Dalam masa paradigma tersebut terjadi pertentangan antara pandangan *value free administration*, pandangan yang mengakui bahwa administrasi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu, dengan pandangan *value-laden politics*, politik yang sarat akan nilai. Hal tersebut menimbulkan adanya anggapan bahwa birokrasi pemerintahan merupakan *locus* Administrasi Publik sebagai ilmu politik, dan kesamaran terjadi pada *focus*-nya.

b) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma tersebut menjadikan perilaku organisasi, penggunaan teknologi, analisis manajemen, riset operasi, dan yang lainnya sebagai *focus*, namun *locus*-nya tidak disediakan. Paradigma tersebut menekankan pada kebijakan publik serta psikologi sosial dengan melatarbelakangi administrasi murni.

c) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Berbeda dengan paradigma-paradigma yang sebelumnya, paradigma kelima tersebut sudah memiliki *focus* yang jelas begitu juga dengan *locus*-nya. Teori organisasi, teori manajemen, dan

kebijakan publik menjadi *focus*, sedangkan masalah-masalah serta berbagai kepentingan publik menjadi *locus*-nya.

d) *Governance* (1990-sekarang)

Seiring berkembangnya ilmu, paradigma Administrasi Publik telah mencapai tahapan baru yang dikenal sebagai *governance*. (Supriyadi, 2021) mengungkapkan bahwa adanya *governance* menandai bahwa paradigma-paradigma yang ada sebelumnya berorientasi pada *government*. Akibat adanya keberadaan paradigma *governance* tersebut membuat terjadi perubahan perhatian dari ketergantungan pada *government* menjadi adanya keterlibatan banyak *stakeholders* yang bersama melaksanakan penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara (Haris, 2019). Studi pada *governance* sendiri pada umumnya memiliki tiga isu penting yang menjadi perhatian dalam membedakan *governance* tersebut dengan Administrasi Publik yang konvensional, yakni dimensi kelembagaan, dimensi nilai yang mendasar dalam penggunaan kekuasaan, serta dimensi proses sebagaimana yang diungkapkan Dwiyanto (2018:61).

Penelitian ini menganalisis tahapan pemberdayaan fakir miskin untuk mengurangi kemiskinan menggunakan paradigma *Governance*. Adanya pemberdayaan fakir miskin sendiri memerlukan adanya kolaborasi antar pihak karena keberlangsungan suatu program tidak dapat berjalan baik oleh satu pihak saja. Sehingga penelitian ini menerapkan paradigma *Governance*, yang

menekankan pada adanya prinsip partisipasi dan sinergitas antar pihak untuk dapat menjelaskan mengenai tahapan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5.4. Manajemen Publik

Manajemen publik serta kebijakan publik adalah dua bidang dalam Administrasi Publik yang tumpang tindih sebagaimana menurut Overman, dkk, (1991:11) (dalam Keban, 2014:93). Manajemen adalah suatu cara yang mampu memberikan peluang dalam melakukan perencanaan mencapai apa yang diinginkan oleh penggunaannya (Silmi dkk., 2024). Selain itu, manajemen juga dapat memiliki fungsi sebagai pengatur manfaat, efektivitas, serta efisiensi (Surya Abbas dkk., 2020).

Dalam keban (2019:109) menyatakan bahwa manajemen publik merupakan suatu kajian dari organisasi serta merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *controlling*, dan *actuating* yang di dalamnya mencakup sumber daya manusia informasi keuangan politik dan fisik. Ott, Hyde, dan Shafriz (dalam Keban, 2019:109) menyatakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang yang terdapat di dalam Administrasi Publik yang saling tumpang tindih satu sama lain manajemen publik digunakan sebagai proses dalam menjalankan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah dan kebijakan publik berdasarkan penjelasan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan kegiatan mengatur dan mengelola sumber daya yang ada mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi sumber daya yang telah direncanakan sebelumnya agar dalam ku berjalan yang dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan ini serta ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dalam prinsip antara manajemen publik dan kebijakan publik dapat saling berkaitan satu sama lain.

Penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen publik dengan melihat bahwa adanya proses pemberdayaan kepada fakir miskin memerlukan adanya pengelolaan yang efektif, dilakukan secara terencana dan juga berkelanjutan. Sehingga penelitian ini memerlukan pendekatan manajemen publik agar lebih memahami bagaimana pihak pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan kepada fakir miskin.

1.5.5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Adapun jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Indonesia yang terdaftar di Kementerian sosial adalah anak balita terlantar; anak terlantar; anak yang berhadapan dengan hukum; anak jalanan; anak dengan

kedisabilitas; anak yang menjadi korban tindak kekerasan; anak yang memerlukan kebutuhan khusus; lanjut usia terlantar; penyandang disabilitas; tuna susila; gelandangan; pengemis; pemulung; kelompok minoritas; bekas warga binaan lembaga kependudukan; orang dengan HIV/AIDS; korban penyalahgunaan NAPZA; korban *trafficking*; korban tindak kekerasan; pekerja migran bermasalah sosial; korban bencana alam; korban bencana sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; fakir miskin; keluarga bermasalah sosial psikologis; dan komunitas adat terpencil. PPKS tersebut oleh Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi:

1. kemiskinan,
2. keterlantaran,
3. disabilitas,
4. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
5. korban bencana,
6. keterasingan, serta
7. korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian Bappenas dan mempertimbangkan ketersediaan data serta kebutuhan penanganan, PPKS tersebut dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok penduduk yang memerlukan manfaat pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang memerlukan layanan/PPKS, pemerintah melalui Kementerian

Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

1.5.6. Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan salah satu kategori yang terdapat pada Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Soal No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali dan/atau tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya serta keluarganya. Kebutuhan dasar ini sendiri termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta air bersih.

1.5.7. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mulai muncul ketika gagalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep pembangunan (Alhada dkk., 2021). Pemaknaan pemberdayaan harus menjadi masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Sehingga dalam menjadikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, diperlukan beberapa pendekatan sebagaimana menurut Suaib (2023), yakni:

1. Upaya yang dilakukan harus terarah (*targeted*)

Pemberdayaan yang dilakukan harus benar-benar mengetahui target jelas yang hendak diberdayakan dan disesuaikan dengan program yang dibuat dalam mengatasi permasalahan yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

2. Program yang dilakukan harus dapat melibatkan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri

Tujuan dalam pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program adalah untuk tercapainya efektivitas karena program yang ada terlaksana selaras dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

3. Menggunakan pendekatan kelompok

Adanya upaya individu tanpa melibatkan pihak lain akan membuat pemecahan masalah yang ada akan semakin sulit. Luasnya lingkup dalam upaya menangani secara individu membuat pendekatan kelompok menjadi pilihan yang efektif dan efisien.

Pemberdayaan menurut Zubaedi (2007:42-43) adalah upaya yang dilakukan dalam peningkatan harkat dan martabat golongan masyarakat yang dengan berada dalam kondisi miskin dan tidak dapat melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sejalan dengan pendapat Chamber (dalam Zubaedi, 2007) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial yang menjadi cerminan paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Konsep pemberdayaan sendiri jauh lebih luas dibanding hanya sebatas pada upaya untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan itu sendiri.

Mardikanto & Soebianto (2012) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan menjadi implikasi dari strategi pembangunan yang berdasarkan kepada masyarakat (*people centered development*), sehingga apapun bentuk pengertian yang diberikan kepada pemberdayaan akan selalu mengacu kepada upaya-upaya perbaikan, khususnya terhadap perbaikan kualitas hidup manusia. Mardikanto & Soebianto juga menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan meliputi beberapa tujuan, yakni:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)
2. perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)
3. Perbaikan tindakan (*better action*)
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
5. Perbaikan usaha (*better business*)
6. Perbaikan pendapatan (*better income*)
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
8. Perbaikan kehidupan (*better living*)

9. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Berdasarkan pengertian pemberdayaan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang terarah serta partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah dalam hidupnya.

1.5.8. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2017:83-84) terdapat tiga tahapan di dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Tahap penyadaran

Penyadaran sebagai tahap awal dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengenali dan memahami potensi-potensi yang mereka miliki. Kesadaran masyarakat berusaha untuk ditumbuhkan mengenai masalah yang sedang dihadapi serta turut dikenalkan dengan berbagai peluang yang dimiliki untuk digunakan mengatasi masalah yang ada.

2. Tahap transformasi kemampuan

Pada tahap ini diberikan pengetahuan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat sebagai bagian dalam menguatkan kapasitas yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Pada tahap ini pendampingan, pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi, serta penyediaan akses yang mendukung menjadi bagian penting untuk diterapkan pada berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual

Tahap tersebut menjadi bagian lanjutan yang berfokus pada upaya membentuk masyarakat yang mandiri dalam mengambil keputusan, membuat perencanaan, dan mengelola kegiatan sosial dan ekonominya. Adanya kemampuan intelektual yang meningkat dapat ditandai dengan berhasilnya pemberdayaan dan masyarakat yang sudah mandiri tidak bergantung pada pihak lain.

Tim Delivery (2004 dalam Mardikanto & Soebianto, 2012) menawarkan empat tahapan kegiatan pemberdayaan mulai dari seleksi lokasi hingga pemandirian masyarakat, yakni:

1. Tahap 1, seleksi lokasi
2. Tahap 2, sosialisasi pemberdayaan masyarakat
3. Tahap 3, proses pemberdayaan masyarakat
 - a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif
 - b. Pengembangan kelompok
 - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
 - d. *Monitoring* dan evaluasi partisipatif
4. Tahap 4, pemandirian masyarakat

Tahapan pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebianto (2012) dibagi menjadi 7 tahapan, yakni:

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja

Tahap ini dilakukan kesepakatan antara tim fasilitator, para pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gesekan atau konflik kepentingan, namun untuk membangun sinergi dan mendukung dalam keberhasilan program pemberdayaan.

2. Sosialisasi kegiatan

Melakukan komunikasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan serta pihak-pihak terkait dengan pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi, dan langkah-langka yang akan dilakukan.

3. Penyadaran masyarakat

Menyadarkan masyarakat mengenai kondisinya dan posisinya saat ini sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

4. pengorganisasian masyarakat

Melakukan pengorganisasian masyarakat untuk melakukan perubahan dalam memecahkan dan memperbaiki keadaan.

5. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pelaksanaan dilakukan melalui berbagai pelatihan untuk memberikan pengetahuan teknis dan keterampilan tambahan kepada masyarakat. Pengembangan kegiatan juga dilakukan terutama pada peningkatan pendapatan guna membiayai kegiatan yang diperlukan untuk membangun kemandirian dan meyakinkan bahwa peran bantuan memang mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

6. Advokasi kebijakan

Setiap upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Kegiatan ini juga digunakan untuk mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat.

7. Politisasi

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh dan menjaga legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang hendak diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahapan pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tahapan-tahapan yang merupakan suatu proses bertahap dan memposisikan masyarakat sebagai subjek utama perubahan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan pemberdayaan oleh Ambar Sulistiyani, yakni tahap kesadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. Teori ini dipilih karena sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut, yakni menganalisis dan memahami proses pemberdayaan fakir miskin serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut. menyediakan gambar pemahaman yang lebih aplikatif dan berorientasi kepada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat selama proses pemberdayaan dilaksanakan.

1.5.9. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang berhasil dan tidak berhasil tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat. Ketika suatu pemberdayaan berhasil, hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorongnya. Demikian juga

dengan gagalnya suatu pemberdayaan, terdapat faktor-faktor yang membuatnya gagal dan terhambat.

Berdasarkan pada Mardikanto & Soebianto (2012) disebutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat menuntut adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi dan kondisi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan efektif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat disebutkan bahwa terdapat enam aspek lingkup wilayah-kerja pemberdayaan masyarakat. Secara substantif dapat dilihat bahwa keenam aspek tersebut merupakan elemen-elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu pemberdayaan. Keenam aspek tersebut dijadikan landasan untuk melakukan identifikasi berbagai potensi, hambatan, dan kebutuhan masyarakat, sehingga pada penelitian ini peneliti memposisikan keenam elemen tersebut sebagai faktor-faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan masyarakat. Keenam aspek tersebut adalah:

1. Sumber daya alam

Memahami dan mengetahui keadaan sumber daya alam perlu dilakukan untuk dapat memetakan potensi yang dimiliki untuk mendukung proses pemberdayaan berbasis sumber daya alam.

2. Sumber daya manusia

Pemberdayaan akan semakin efektif ketika masyarakat memiliki modal berupa keterampilan, pengetahuan, dan keinginan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan.

3. Keadaan kelembagaan

Kelembagaan berupa organisasi sosial ataupun lokal yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi akses, tolong menolong, dan bekerja sama.

4. Sarana dan prasarana

Pemberdayaan akan semakin mudah dicapai ketika tersedianya sarana dan prasarana berupa infrastruktur fisik dan penunjang usaha yang mendukung aktivitas masyarakat.

5. Kebijakan

Kebijakan tersebut melingkupi berbagai aturan, program dari pemerintah, dan rencana strategis yang dikeluarkan oleh pihak pusat hingga pemerintah daerah. Adanya pemahaman yang baik disertai penerapan yang tepat sasaran akan dapat memastikan program pemberdayaan berjalan baik, sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

6. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat yang tertata dengan baik dengan pembagian peran yang jelas dapat mendukung berhasilnya pemberdayaan masyarakat, didukung dengan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam penelitiannya mengenai pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Tribina Y.B. Mangunwijaya di Kampung Code Yogyakarta, (Anindia, 2018) menemukan beberapa faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Faktor Pendorong:

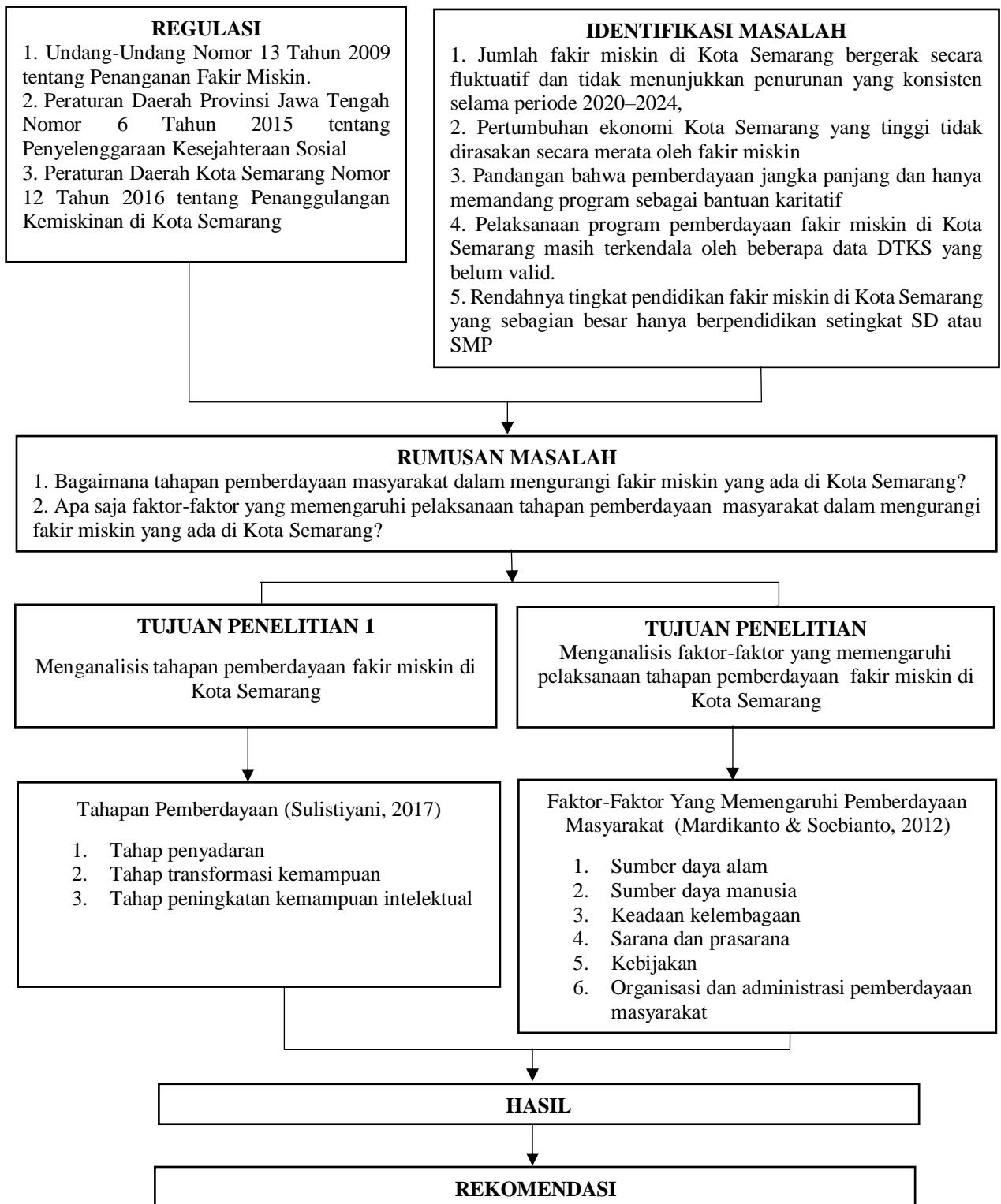
- a. Partisipasi masyarakat
- b. Dukungan dari berbagai pihak luar.

2. Faktor Penghambat:

- a. Rendahnya kualitas SDM
- b. Peran pemerintah.

Berdasarkan pendapat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian ini peneliti memilih 6 faktor yang memengaruhi pemberdayaan oleh Mardikanto & Soebianto untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif agar mendasari analisis yang kuat dalam menilai tahapan pemberdayaan fakir miskin.

1.5.10. Kerangka Pikir Teori



Sumber: Formulasi Peneliti (2025)

Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Teori

1.6.Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Tahapan Pemberdayaan Fakir miskin

Tahapan pemberdayaan fakir miskin merupakan suatu proses yang terarah serta partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang terdiri atas tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual.

Tabel 1.3. Operasionalisasi Konsep Tahapan Pemberdayaan Fakir miskin

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Tahapan dalam pemberdayaan fakir miskin di Tanjung Mas, Kota Semarang	Tahap penyadaran merupakan tahapan di mana masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai potensi yang mereka miliki.	1. pemahaman masyarakat mengenai kondisi kemiskinan yang dialami. 2. Kesadaran akan potensi diri.
		Tahap transformasi kemampuan merupakan proses pengembangan keterampilan teknis dan praktis para masyarakat untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan produktif.	1. Peningkatan keterampilan teknis melalui pelatihan. 2. Penerapan keterampilan dalam aktivitas produktif.
		Tahap peningkatan kemampuan intelektual merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan dalam mengelola kehidupan ataupun usaha secara mandiri dan berkelanjutan.	1. Kemampuan dalam mengambil keputusan ekonomi secara mandiri dan tepat. 2. Kemampuan melakukan perencanaan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Sumber: Sulistiyati (2017) dan Diolah Peneliti (2025)

1.6.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Fakir miskin

Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat dan mendorong keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan kepada fakir miskin yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, keadaan kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, dan organisasi dan administrasi pemberdayaan.

Tabel 1.4. Operasionalisasi Konsep Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Fakir miskin

No.	Fenomena	Subfenomena	Gejala
1.	Faktor-faktor yang memengaruhi program pemberdayaan fakir miskin	Sumber daya alam merupakan ketersediaan berbagai sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat, yang di mana semakin banyak potensi yang ada maka semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk terlibat.	1. Sumber daya lokal yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. 2. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan potensi alam yang tersedia.
		Sumber daya manusia merupakan cerminan kapasitas keterampilan, pengetahuan, serta motivasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraannya.	1. Pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. 2. Kemauan serta motivasi dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
		Keadaan kelembagaan adalah dukungan dari organisasi/lembaga/komunitas lokal dalam memberikan akses berupa informasi, pendampingan, dan partisipasi bagi masyarakat.	1. Pendampingan dan penguatan usaha kegiatan masyarakat melalui dukungan dari lembaga lokal. 2. Partisipasi masyarakat di dalam lembaga tersebut.

	Sarana dan prasarana merupakan ketersediaan berbagai fasilitas yang digunakan dalam mendukung usaha serta, efektifitas masyarakat dapat ditentukan oleh akses terhadap fasilitas tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas yang dapat mendukung keberlangsungan usaha. 2. Kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana tersebut.
	Kebijakan melingkupi berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat berbentuk program, peraturan, dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai sasaran penerima kebijakan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan bagi fakir miskin. 2. Tingkat penerimaan serta akses para masyarakat dalam program tersebut.
	Organisasi dan administrasi pemberdayaan merujuk pada sistem, tata kelola, dan struktur tentang bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan agar terarah dan efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan tugas yang jelas dalam struktur kerja 2. Kejelasan dan kemudahan akses pada mekanisme, koordinasi, dan pengelolaan program dengan masyarakat.

Sumber: Mardikanto & Soebianto (2012) dan Diolah Peneliti (2025)

1.7. Argumen Penelitian

Upaya pemberdayaan bagi fakir miskin di Kota Semarang merupakan bagian dari upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan bagi fakir miskin di Kota Semarang.

Pemberdayaan sosial yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat menangani kemiskinan dengan

meningkatkan kapasitas, akses, serta partisipasi dari masyarakat sendiri, hal ini tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Sulistiyani (2017) menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa tahapan pemberdayaan mulai dari penyadaran, peningkatan kemampuan, sampai kepada terbentuknya kemandirian intelektual masyarakat. Melalui tahapan tersebut tersebut, pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi yang ada, dan tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan yang diberikan.

Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis proses pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan, khususnya pada penelahan tahapan pemberdayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa saran dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Sosial Kota Semarang, dalam optimalisasi kebijakan serta pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, sehingga upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2024:2) sebagai suatu cara ilmiah yang didasarkan pada sifat yang rasional, empiris, dan sistematis dalam memperoleh data melalui tujuan dan kegunaan tertentu. Raco

(2010:5) menambahkan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, terukur, dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang guna mengurangi angka kemiskinan. Menurut Sugiyono (2024:18) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang holistik dan mampu memahami secara mendalam kompleksitas masalah kemiskinan serta dinamika program pemberdayaan.

Desain deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang proses dan dampak program pemberdayaan, mencakup faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, kualitas SDM, peran pemerintah, dan dukungan pihak luar, serta tahapan pemberdayaan seperti penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. Sugiyono (2013:147) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai situs utama untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan fakir miskin guna mengurangi angka kemiskinan. Pemilihan Kota Semarang

didasarkan pada tingginya angka kemiskinan (4,85% atau 83.000 jiwa pada 2023, BPS), meningkatnya indeks kedalaman (P1: 0,59) dan keparahan kemiskinan (P2: 0,12) pada 2024, serta keberadaan program pemberdayaan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola Dinas Sosial Kota Semarang.

Situs penelitian ini relevan untuk mengkaji faktor-faktor pemberdayaan, seperti partisipasi, kualitas SDM, peran pemerintah, dan dukungan pihak luar. Selain itu, situs ini mendukung analisis tahapan pemberdayaan, seperti penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan intelektual. Dengan demikian, Kota Semarang menjadi lokasi ideal untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi kontekstual guna mengoptimalkan program pemberdayaan fakir miskin.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau yang disebut juga sebagai informan adalah individu atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagaimana menurut Sugiyono teknik tersebut digunakan ketika peneliti membutuhkan informan yang dianggap lebih mengetahui kondisi yang diteliti. Dalam penelitian ini, setiap informan yang dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, serta jabatan yang relevan dengan program pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang.

Penelitian tersebut juga menggunakan teknik *snowball sampling* guna menentukan informan tambahan. Teknik ini digunakan ketika jumlah sumber data yang dimiliki masih belum memuaskan sehingga mencari sumber lain yang dijadikan sumber data (Sugiyono, 2024). Selain itu, tidak semua aktor pemberdayaan memiliki struktur organisasi formal, contohnya pada level masyarakat penerima manfaat dan pendamping sosial. Subjek penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai informan adalah:

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dipilih karena memiliki kewenangan di dalam melakukan perumusan, pengawasan, serta evaluasi program dan kebijakan pemberdayaan sosial yang dilakukan di Kota Semarang. Informasi yang diberikan oleh informan tersebut dapat memberikan perspektif kebijakan serta arah strategi pemberdayaan dalam mengurangi angka fakir miskin di Kota Semarang secara struktural.

5. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Informan dipilih karena memiliki peran dalam mengkoordinasi pelaksanaan teknis pemberdayaan ekonomi, khususnya pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Informan dapat memberikan informasi mengenai mekanisme implementasi serta pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh fakir

miskin khususnya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

6. Staf Pengembangan Ekonomi

Informan dipilih karena memiliki keterlibatan secara langsung dalam melaksanakan teknis program terutama pada Kelompok Usaha Bersama khususnya individu, juga termasuk pada pendataan, verifikasi, serta *monitoring* kelompok usaha yang dibina.

7. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

Informan dipilih karena memiliki peran serta pengalaman secara langsung di dalam melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat. Informasi yang diberikan dari perspektif serta pengalaman yang dialami oleh Pendamping PKH membantu menjelaskan dinamika serta berbagai kondisi sosial ekonomi selama menerima bantuan sosial.

8. (TKSK) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

TKSK memiliki peran langsung sebagai pendamping dan fasilitator pemberdayaan di tingkat kecamatan. Informan berinteraksi dengan fakir miskin, mengetahui dinamika kelompok sasaran, tingkat partisipasi masyarakat, dan hambatan teknis selama pelaksanaan program. Pengalaman empiris TKSK dapat memberikan informasi mengenai kondisi di lapangan masyarakat.

9. Anggota KUBE

Informan dipilih sebagai penerima program pemberdayaan ekonomi yang produktif. Informan memiliki pengalaman serta tergabung ke dalam kelompok usaha bersama, sehingga dapat memberikan informasi dan perspektif selama menjalankan usaha kelompok, pelatihan yang diberikan, serta berbagai dinamika yang dialami selama berusaha bersama kelompok.

10. Penerima PKH

Informan dipilih sebagai yang menerima program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Informan memiliki kondisi dan pengalaman sebagai penerima bantuan sehingga dapat memberikan gambaran atau persepsi mengenai bantuan sosial yang diterima dan penggunaan manfaat.

11. Graduasi Mandiri

Informan dipilih karena telah menunjukkan perbedaan dari para penerima manfaat dan bantuan sosial yang masih menerima dari pemerintah. Informan telah berada pada kemandirian yang cukup sehingga tidak lagi menerima bantuan tersebut, sehingga informan dapat memberikan perspektif mengenai transisinya selama menerima bantuan sampai kepada melepaskan bantuan dan menjadi graduasi mandiri.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian adalah pengelompokan berbagai informasi dan data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Jenis data dibedakan menjadi 2 menurut Sugiyono (2024), yakni;

1. Data kualitatif, berbentuk deskriptif berupa kalimat atau narasi yang dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti.
2. Data kuantitatif, berbentuk numerik atau ukuran statistik.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk dapat mendeskripsikan secara lebih jelas mengenai proses pemberdayaan fakir miskin serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan wawancara kepada informan yang telah dipilih, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari berbagai laporan.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai subjek yang menjadi asal ditemukan dan dikumpulkannya data, baik itu individu, kelompok, ataupun dokumen (Sugiyono, 2024). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk menganalisis proses pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses pemberdayaan yang dilakukan dalam mengurangi fakir miskin dan faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut.

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara mendalam serta observasi langsung ke lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, yaitu pejabat Dinas Sosial Kota Semarang, seperti Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Staf Pengembangan Ekonomi, Pendamping PKH, TKSK, serta para penerima manfaat yang terdiri atas anggota KUBE, penerima PKH, dan penerima manfaat yang telah graduasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian tersebut, seperti Peraturan Daerah Kota Semarang, Laporan Tahunan Dinas Sosial Kota Semarang, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Statistik Kemiskinan BPS Kota Semarang, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan kondisi fakir miskin serta program pemberdayaan yang berlangsung di Kota Semarang. Pengamatan dilakukan secara sistematis di lokasi strategis, seperti pusat kegiatan pemberdayaan atau komunitas target, dengan mencatat interaksi, pola kegiatan, dan kendala yang muncul. Observasi ini bersifat non-partisipatif untuk menjaga

objektivitas, menggunakan panduan observasi terstruktur untuk memastikan data relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam upaya pemberdayaan.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, dan persepsi dari para pemangku kepentingan, seperti fakir miskin sebagai penerima manfaat, pelaksana program pemberdayaan, dan pejabat terkait di Dinas Sosial, Kota Semarang. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan dengan panduan pertanyaan yang fleksibel namun terfokus pada aspek tahapan pemberdayaan yang dilakukan.

Informan dipilih melalui *purposive sampling* untuk memastikan representasi yang relevan dengan menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data. *Purposive Sampling* dipilih dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman yang jelas dan secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2024:289).

Peneliti turut menggunakan teknik *snowball sampling* dalam meneliti yang di mana informan awal dapat memberikan arahan untuk menggali informasi yang lebih kepada informan lain yang dapat memberikan data yang lebih memuaskan (Sugiyono, 2024:189).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi, seperti laporan program pemberdayaan, data

kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, kebijakan pemerintah daerah, dan catatan kegiatan organisasi terkait. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami latar belakang, progres, dan evaluasi program pemberdayaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memverifikasi keabsahan dan relevansi dokumen untuk mendukung temuan dari observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pemberdayaan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis pada data dilakukan sepanjang proses kegiatan mengumpulkan data berlangsung, yang di mana kegiatan tersebut adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2024) analisis data dilakukan dengan mencari dan melakukan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh untuk memudahkan pemahaman. Dalam penelitian menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2024).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses yang memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data-data mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna. Peneliti melakukan seleksi informasi-informasi penting yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan fokus utama penelitian, yakni

tahapan pemberdayaan dan faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut, sehingga data yang telah diperoleh menjadi lebih terstruktur dan relevan dalam menjawab fokus penelitian.

2. Penyajian data

Pengorganisasian informasi dilakukan di tahap ini dengan sistematis dan bermakna serta memungkinkan dalam menampilkan data ke dalam bentuk tabel, grafik, dan naratif deskriptif yang menjelaskan hubungan antar fenomena yang diteliti. Tujuan utama dari tahap penyajian data yakni untuk memudahkan peneliti mengerti dan memahami kondisi apa yang sedang terjadi dan melakukan perencanaan untuk tahapan yang akan diambil selanjutnya.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada hasil data yang didapat selama melakukan penelitian dan bukan berdasarkan keinginan peneliti. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan yang ada di lapangan secara mendalam untuk dapat memahami bagaimana proses-proses tahapan pemberdayaan berlangsung serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemberdayaan tersebut. Kesimpulan ini dihubungkan dengan tujuan penelitian, menghasilkan rekomendasi yang berguna dalam mengoptimalkan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data yang valid serta terpercaya merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian ini guna memastikan temuan yang akurat dan juga relevan dengan tujuan penelitian (Jailani, 2020). Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat memverifikasi data dan informasi dari berbagai perspektif dan juga metode, sehingga akan dapat mendukung analisis yang lebih mendalam.

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada sumber-sumber yang berbeda, yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Staf Pengembangan Ekonomi, Pendamping PKH, TKSK, serta para penerima manfaat yang terdiri atas anggota KUBE, penerima PKH, dan penerima manfaat yang telah graduasi.
- b. Triangulasi teknik dilakukan melalui penerapan tiga teknik pengumpulan data, yakni:
 1. Observasi dengan mengamati kegiatan dan aktivitas terkait yang dilaksanakan pada program pemberdayaan seperti pelatihan dan program-program pemberdayaan lainnya yang dilakukan, serta proses pendampingan oleh pendamping PKH dan TKSK di lapangan.
 2. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub

Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Staf Pengembangan Ekonomi, Pendamping PKH, TKSK, serta para penerima manfaat yang terdiri atas anggota KUBE, penerima PKH, dan penerima manfaat yang telah graduasi .untuk mendapatkan wawasan dan informasi terkait.

3. Dokumentasi melalui analisis laporan-laporan seperti laporan Dinas Sosial Kota Semarang, data DTKS Kota Semarang, laporan evaluasi program pemberdayaan.